

**STRATEGI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI
SULAWESI UTARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYAMPAIAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Rafi Samuel Lantang¹, Michael Mamentu^{2*}, Jones Tompudung³, Johnly Pangemanan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sam Ratulangi Manado

Email Korespondensi: rafilantang084@student.unsrat.ac.id

ABSTRACT

The Regional Government Implementation Report (LPPD) is an important instrument in regional governance that serves as a form of accountability of regional heads to the central government. In practice, delays in submitting LPPDs by South Minahasa Regency are still found, which impacts the quality of reports and the effectiveness of evaluation of regional governance. This study aims to analyze the strategy of the Bureau of Government and Regional Autonomy of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province in improving the quality of LPPD submissions in South Minahasa Regency. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implemented strategy has been running quite well through the establishment of clear objectives, implementation of technical guidance, intensive coordination with the district government, utilization of apparatus resources, and regular monitoring and evaluation. However, there are still obstacles such as delays in data submission from OPDs, limited apparatus competency in managing Key Performance Indicator (IKK) data, and suboptimal utilization of information technology. Therefore, it is necessary to increase human resource capacity, strengthen coordination across regional agencies, and optimize digital-based information systems to improve the quality of LPPD delivery in a sustainable manner.

Keywords: Strategy, Bureau of Government and Regional Autonomy, LPPD.

ABSTRAK

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat. Dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan penyampaian LPPD oleh Kabupaten Minahasa Selatan yang berdampak pada kualitas laporan serta efektivitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas penyampaian LPPD Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah berjalan cukup baik melalui penetapan tujuan yang jelas, pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten, pemanfaatan sumber daya aparatur, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyampaian data dari OPD, keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi sistem informasi berbasis digital guna meningkatkan kualitas penyampaian LPPD secara berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, LPPD, Pemerintahan Daerah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah daerah dituntut mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD menjadi dokumen penting karena memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang selanjutnya digunakan pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Di Provinsi Sulawesi Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyusunan LPPD kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya pada Kabupaten Minahasa Selatan, berupa keterlambatan penyampaian data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum lengkapnya Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan penyusunan LPPD tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga berpotensi menurunkan kualitas laporan.

Strategi yang tepat sangat diperlukan agar kualitas penyampaian LPPD dapat meningkat. Menurut Salusu (2006), strategi merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan teori tersebut penelitian ini menganalisis strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui lima indikator yaitu tujuan yang jelas, perencanaan tindakan, efektivitas penggunaan sumber daya, fleksibilitas, serta pengendalian dan evaluasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Informan penelitian terdiri atas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Analisis Kebijakan Muda, serta Tim Penyusun LPPD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian didasarkan pada teori strategi Salusu yang meliputi tujuan yang jelas, perencanaan tindakan, efektivitas penggunaan sumber daya, fleksibilitas, serta pengendalian dan evaluasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang relevan dengan strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Minahasa Selatan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Informan penelitian terdiri atas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Analisis Kebijakan Muda, serta Tim Penyusun LPPD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian didasarkan pada teori strategi Salusu yang meliputi tujuan yang jelas, perencanaan tindakan, efektivitas penggunaan sumber daya, fleksibilitas, serta pengendalian dan evaluasi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

134

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX



Tujuan Yang Jelas

Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur yang ingin dicapai melalui strategi. Dalam penelitian ini peneliti akan mendalami bagaimana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur dalam meningkatkan kualitas penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Minahasa Selatan. Seperti, apa target yang akan dicapai terkait akurasi data, ketepatan waktu penyampaian, kelengkapan laporan, atau peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah. Tujuan utama strategi yang diterapkan adalah untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan ketepatan waktu penyampaian LPPD agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan ini mencakup aspek kelengkapan data, akurasi informasi, konsistensi laporan, serta kesesuaian dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Tujuan tersebut telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah melalui rapat koordinasi, bimbingan teknis, serta surat edaran resmi. Dengan adanya tujuan yang jelas, seluruh pihak yang terlibat memiliki arah yang sama dalam penyusunan LPPD. Menurut Salusu (2006), kejelasan tujuan merupakan dasar utama dalam penyusunan strategi yang efektif.

Perencanaan Tindakan

Merumuskan serangkaian langkah atau tindakan yang terorganisir dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis langkah-langkah konkret yang diambil Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Minahasa Selatan. Perencanaan tindakan dilakukan melalui penyusunan program kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara menyusun langkah-langkah konkret seperti pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), penyediaan pedoman penyusunan LPPD, serta koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Siagian (2004), perencanaan merupakan fungsi dasar dalam manajemen yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Perencanaan yang baik akan mempermudah pelaksanaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan di lapangan.

Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya (manusia, finansial, material) secara tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengevaluasi bagaimana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara mengelola sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas staf dalam program peningkatan kualitas penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Minahasa Selatan. Efektivitas penggunaan sumber daya dalam penyusunan LPPD ditunjukkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Aparatur yang terlibat telah memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing, serta didukung oleh pelatihan dan bimbingan teknis. Menurut Hasibuan (2016), efektivitas penggunaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Sumber daya yang dikelola secara optimal akan meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi.

Fleksibilitas

Pengelolaan sumber daya (manusia, finansial, material) secara tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengevaluasi bagaimana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara mengelola sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas staf dalam program peningkatan kualitas penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Minahasa Selatan. Strategi yang diterapkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

135

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX



bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Biro melakukan penyesuaian strategi berdasarkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota, seperti keterlambatan pengumpulan data atau perbedaan kapasitas aparatur. Strategi yang diterapkan bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Biro melakukan penyesuaian strategi berdasarkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota, seperti keterlambatan pengumpulan data atau perbedaan kapasitas aparatur. Menurut Robbins dan Coulter (2012), organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Fleksibilitas strategi menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.

Pengendalian Dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi strategi untuk memastikan sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti akan mendalami mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk menilai keberhasilan program peningkatan kualitas penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Minahasa Selatan. Apakah program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, apakah ada kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program, dan bagaimana penanganannya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara sistematis melalui monitoring berkala terhadap progres penyusunan LPPD serta penilaian kualitas laporan yang dihasilkan. Pengendalian dilakukan sejak tahap awal hingga akhir penyusunan laporan. Menurut Handoko (2011), pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi berfungsi untuk menilai keberhasilan dan menjadi dasar perbaikan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas penyampaian LPPD Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan cukup efektif melalui penetapan tujuan yang jelas, penyusunan perencanaan tindakan, pemanfaatan sumber daya, fleksibilitas terhadap perubahan kebijakan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Kendala utama yang masih dihadapi adalah keterlambatan penyampaian data oleh OPD, keterbatasan kapasitas aparatur, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi agar kualitas penyampaian LPPD semakin baik.

REFERENSI

- Digantoro. (2000). *Manfaat Strategi*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Ferdinandus S. Tumbelaka (2021) “Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPPD di Provinsi Sulawesi Utara”
- Hendra L. Kambey (2021) “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyampaian LPPD di Daerah Otonom Sulawesi Utara: Studi Kasus Kabupaten Minahasa Selatan”
- Maria Y. R. Wowor (2021) “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan dan Penyampaian LPPD di Kabupaten Minahasa Selatan”
- Rina T. Lumintang (2022) “Evaluasi Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Minahasa Selatan: Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Peningkatan”
- Sari M.A, Lumintang R, (2020) “Strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Provinsi Sulawesi Utara”.